

PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2024



DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN



RANCANGAN PERATURAN DESA DERMOLEMAHBANG NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Pemerintah Desa wajib Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan desa;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022:
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 16. Peraturan Desa Dermolemahbang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo (Lembaran Desa Dermolemahbang Nomor 7 Tahun 2016)
- 17. Peraturan Desa Dermolemahbang No. 04 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) Desa Dermolemahbang Tahun 2012 – 2028 (Lembaran Desa Dermolemahbang Nomor 4 Tahun 2022).

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLEMAHBANG DAN

KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud:

- Desa adalah Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

- Kepala Desa adalah Kepala Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Demolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan.
- Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa.
- Keputusan Kepala Desa Dermolemahbang adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Dermolemahbang dalam melaksanakan peraturan Desa Dermolemahbang.
- 10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
 Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang

- dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
- Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP-Desa untuk:

- Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Merumuskan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah;
- Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB HI TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 4

- (1) Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
- (3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RKP-Desa.
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

- Pembangunan Rabat Jalan Lingkungan Lemahbang;
- Pembangunan Rabat Jalan Lemahbang-Jogo
- Pembangunan TPT Jogo;
- Pembangunan TPT Lemahbang-Jogo
- Pemabangunan TPT Lemahbang-Dermo
- Pemangunan Saluran Air Dusun Serut
- Plat Beton JUT Dusun Besuki
- Jembatan JUT Dusun Serut
- Jemabatan Jalan Baru Bendil
- 2) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - pengelolaan lingkungan hidup;
- Sub Bidang Penyelenggaraan Informasi Publik
 Desa
 - Pembuatan website desa;
 - pembayaran wifi;
 - penyediaan insentif operator desa.
- 2.2.2 RKP Tahun 2023 Bidang Pembangunan yang belum dilaksanakan di antaranya:
 - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - pembangunan jalan baru dusun Bendil
 - pembangunan makadam Dusun Lemahbang;
 - pengerasan jalan alternatif Dusun Serut;
 - pengurukan/ peninggian lapangan olahraga;
 - pembangunan saluran air RT. 003 RW. 002:

2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- 2.3.1 RKP Tahun 2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang telah dilaksanakan antara lain:
 - 1) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
- 2.3.2 RKP Tahun 2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang belum dilaksanakan antara lain:
 - 1) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
- 2) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - pengadaan sarana olah raga;
 - penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;

2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 2.4.1 RKP Tahun 2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dilaksanakan antara lain:
 - Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa;
- 2.4.2 RKP Tahun 2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang belum dilaksanakan antara lain:
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - peningkatan kapasitas aparatur desa;

2.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

- 2.5.1 RKP Tahun 2023 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang telah dilaksanakan antara lain: (tidak ada)
- 2.5.2 RKP Tahun 2023 Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang belum dilaksanakan antara lain:
 - 1) Sub Bidang Keadaat Darurat
 - Penanggulangan Kekurangan/ Kekeringan Air

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain:

 Adanya kenaikan Penghasilan Tetap Perangkat Desa (SILTAP) yang tidak diimbangi dengan kenaikan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) menyebabkan desa tidak bisa menganggarkan untuk kegiatan operasional semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa. LKD tersebut yaitu LPMD, PKK, Karang Taruna dan linmas.

- Pemerintah desa juga tidak bisa menganggarkan untuk kegiatan peryusunan RKP-Desa dan APBDesa serta pengadaan seragam hansip/ linmas.
- Dikarenakan adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19), maka perlu dianggarkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan. Tidak hanya itu, tetapi ada juga penganggaran untuk kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

C. USAHA UNTUK MENGATASI MASALAH

- Penyediaan operasional LKD, yaitu LPMD, PKK, Karang Taruna dan Linmas yang tidak bisa tercover dari ADD, akan dicover oleh Pendapatan Asli Desa (PAD) denganbesaran anggaran yang tidak sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan PAD tidak banyak.
- Menghapus penganggaran untuk kegiatan penyusunan peryusunan RKP-Desa dan APBDesa serta pengadaan seragam hansip/ linmas.
- Menghapus dan atau mengalihkan beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 serta Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB IV SISTEMATIKA RKP-Desa

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Visi - Misi Desa

1.4 Maksud dan Tujuan

BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN

SEBELUMNYA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2 Bidang Pembangunan Desa

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Pendapatan Desa

3.2 Belanja Desa

BABIV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1 Rumusan Prioritas Masalah

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 6

Isi dan uraian RKP-Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Dalam pelaksanaannya RKP-Desa Tahun 2024 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa).

BAB V MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam "Lembaran Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 9".

Ditetapkan di

: Dermolernahbang

pada tanggal

13 September 2023

KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG

Diundangkan di Dermolemahbang Pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DESA DERMOLEMAHBANG

ZAINUL MUSTHOFA

LEMBARAN DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 9

FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2024

Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi

DERMOLEMAHBANG
SARIREO
LAMONGAN
JAWA TIMUR

	bidang/ Sub bidang/ Hinis Kegiatan	IENIS KEGIATAN	LOKASI			SASARAK	WANTU		SUMBER		POLA PELAKSANAAN	RAN	RENCANA PELAKSANA
SYDANG	SUR BICANG	Jenis Kegiatan	KEGIATAN	A COLUMN	National	MANEART	#ELAKSANAAR	Linklan Biath (ap.)	BIAYA	SWAKELOLA	KERJASAMA ANYAR DESA	KERUASAMA PIHAK KETIGA	KEGIATAN
1 2	~	4	S	ê	7	8	6	10	11	12	13	14	15
1. Penyalenggaraan penyalenggaraan	Pecyelengarian Beans	Penyedisan penghavilan tetap dan tunjangan kapata desa	Kantor Dese	gn.	Busya	Poningkatan kineria	12 Sufan	36.000 000	A.D.S	>		8	Kasi Pemerintahan
	Tonjangan dan Dearasional Pemerintaban		Kantor Desa	14	grang	Sentrighaten kineria	22 bulan	342,357,200	ADD	>		15.0	Kasi Pemerintahan
	ren ren	Penyedian tunjangan kepata desa dan persogkat desa	Калког Desa	9	Brand	Pennykatan kinerja	12 bulan	\$4,000,000	BINE CHAIR	>	-		Kasi Pemerintahan
		Penyasaan janinan sosial bagi kepata desa dan perangkat desa	Karkor Desa	ø	Suevio	Jaminan sosal dan kesehatan	12 bulan	20,248,259	ADO	>			Kasi Pemerintahan
	and the same of th	Penyediaan operasional penterintah desa	Kantor Dess	~	ON THE REAL PROPERTY.	Kelancaran	12 bulan	9,135.400	AQÐ	>			Kasi Pemerintahan
	4	T. I.	Kanter Desa	4.4	SECTION OF SECTION SEC	Ketancaran	12 bulan	1,000,000	PAD	V			Kasi Pemerintahan
		Peryedian tunisngan BPD	Desa	5	Orieng	Poningkatan	12 Bulen	7,500.000	A3b	>			Kasi Pemerintahan
		Penyedisan operational 8PD	Dese	onfarm-types-accounts-page	HECOMORPHIC PROPERTY OF THE PR	Kelance/ac	12 bulan	2,000,000	App	>			Kasi Pemerintahan
		Honer 8PD	Desa	5	Busa)	Peningkatan	12 bylan	2.000.600	PAD	↑			Kasi Pemerintahan
		Operasional RT	Desa	8		Poningkatan Kineria	12 bulan	17,500,090	GCIA	٥			Kasi Perkerintahan
		Honor Kerua AT	Desa	8	breng	:Xelanzaran (operasiona)	12 bulan	35.000 000	Gyd	>			Kasi Pemerekahan
		Penyedaan tambahan lunjangan kepala deta dan perangkat deta dari sewa tanah banekos	Kansor Desa	5	oreng	deningkatan kinerja	12 bulan	54.000.000	PAD	>			Xaz Parariciation
		Operational RW	Oesa	2	The state of the s	Peningketan	52 bulan	900,000	400	*			Kasi Pemerintahan
	1	Operasional LPM	Dava	A A		Kelancaran	12 Bulan	1,300,000	DYD	>		The second secon	Kasi Pemerukahan
		Honer Pengurus LPM	Desa	6	Orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	1,900,000	DAG	>			Kasi Pemerintahan
		Operasional Posyanda	Desa			Kefancaran operasional	12 Bulan	600.000	GOV	,			Kasi Pemerintahan
		Operasional PKK	Desa	1		Xelanearan operasional	12 bulan	1.600.000	PAG	>			Kasi Pemerintahan
		Operasional Karang Taruna	RSAC	1		Kelancaran operational	12 bulan	1,200,000	9AD	>			Kasi Pemerintahan
		Operational Linnas	Desa	н		Kelancaran operasional	12 bulan	300,000	PAD	^			Kasi Pemerintahan
		Honor Linmas	Desa	1	orang	Peningkatan kineria	12 bulan	200.000	PAD	>	٠	٠	Kasi Pemerintahan

		Honor HIPA	Desa	2	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	1.600.000	PAB	>		7	Kasi Pemerintahan
		Honor PPXBD dan sub PPKBD	Desa	2	orang	Peningkatan	12 bulan	400:000	240	>	K)	χl	Kasi Pemerintahan
x	5 Sarana dan Prasarana	Rehabilitasi Balai Desa/ Kantor Desir	Desa	1	unit	Peningkatan	3 bulan	200.000.000	APBD 4345			>	Pihak Ketiga
		Perneliharaan Gedung Balai Desa	Desa	-	unit	Perbalkan sarpras	12 bulan	3,218,040	8990890	>	,		Kasi Kesmasy
- 1	c Penyolenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangah, dan Pelaporan	Penjusanan dokumen perencanaan (RKPDesa)	Kantor Desa		unit	Ketertüsn administrasi	2 húan	2.500.000	7000	٨	,		Kasi Pomerintahan
					and the same		ARRIAH PER BIDANG	755.019.799					
Pelaksanaan Sautkana saa Desa	a PenSdikan	Bentuen honor pengajar PAUD	Oesa	4	Or ang	Peningkatan kheria	12 bulan	5,000,000	8	¥		4	Kase Umum
	Marine	Bantuan honor pengajar madrasah	Desa	2	guero	Penkagkatan	12 bulan	15.000.000	00	ų		*	Kaur Umum
		APE PAUD HI	Desa	1	unit	Penkngkatan Karoras pendidikan	1 bidan	10.000.000	DQ	'n		il.	Kaur Umum
	b Kesehatan	Peryelenggeraan Posyandy dan Pencegahan Stusting	Desk	7	¥4	Peningkatan Kesehatan	12 bulan	6.500.000	90	v	٠	n#S	Kast Pemerintahan
		Pemberlan insensif kader posyandu	Desa	15	Bueso	Peningkatan kinarja	12 Bulan	12.600.000	Ωd	٨		6	Kasi Penerintahan
		Pemberian insentif XPM	Desa	-4	Orang	Peningkatan Unanja	12 Sulan	1,200,000	90	>	*		Kasi Pemerintaban
		Operazional mobil sehat	Desa	1	Unit	Peningkatan pelayanan	12 bulan	20.006.000	90	٨			Kasi Pelayanan
		Pelatinan Kadar Posyandu	Oesa	35	3ue ro	Peningkatan pelayanan	13 Oulan	5,000.000	ao	٨			Kaur Perencanaan
		Rabat Jalan Poros Jogo-Karangaji	Serus	82	mater	Memperlancar transportasi	3 bulan	200.000.000	qc	73.			Kaur Umum
		TPT Jalan Lemahbang-Dermo	Serut	150	meter	Memperlancar fransportasi	3 bulan	200.000.000	go	>			Kasi Pélayanan
	i in	Rabat Jalan Lemahbang-Dermo	Besuki	40	colt	Memperlancar aliran air	3 bulan	200.000.000	90	24			Kaur Perencanaan
		(Normalisasi Waduk Osn. Besuki	Besuki	200	Ruchik	Merambah Debit Alt	3 bufan	30.600 000	APSD KAR	٨		٠	Kasi Pelayanan
		Rabat Jalan Besuki-Bendii	Besuki	20	unit	Mengerlancar Isaluran irigasi	1 bulan	260.000.000	00	>		,	Kasi Resmapy
		Jembatan Jalan Baru	BendB	100	meter	Memperlancar	2 trulan	15.002.000	Sansum	٨			yzen Kesmasy
	4	TPT tatan Poros Jogo-Lemabbang	Dermo	400	meter	Mamperlancar Transportasi	1 bulan	40.000.000	Sansum	>			Kasi Kesmasy
	7	Normalisasi Waduk Dsn. Dermo	Dermo	200	kubik	Menambah Deba	3 bukan	30,000,000	AP9D X46	>			Kasi Kesmany
		Rabat Beton Jalan Poros Kedungkumpul- Dermo	Dermo	200	meter	Memperlancar transportasi	3 bukan	300.000.000	DO	>			Kaur Perencanaan
	Peckerjaan Umum dan	TPT Jalan Lingkungan RT.4	loga	100	meter	Mengoerlancar aliran air	1 bulan	30.000.000	00	*			Kaur Perencanaan
- F		Saluaran Ah RT.03	ožoj	100	meter	Memperlancar altran altr	1 butan	80.000.000	AFBD Kab	34			Kaur Perencanaan
		Rabat Beton Jalan Poros Karangaji Jogo	Kerangaji	900	meter	Memperiancar transportasi	3 bulan	200.000.000	APBO Kah	>			Kaur Perencanaan
		Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.01	Karangaji	100	meter	Memperlancar transportasi	3 bulan	80.000.000	OO	٨			Kaur Perencanaan

		Rabat Beton jalan Lingkungan Rt.04/07	Lemahbang	130	meter	Memperlancar transportasi	3 bulan	40.000.000	Bansun	>			Kaur Perendanaan
		Rabat Beton jalan lingkungan Rt.03/07	Lemahbang	9	meter	Memperlancar transportasi	4 bullan	50.000.000	QQ	7			Kaur Perencansan
		Saluaran Air RT, 04/108	Legisppaus	82	meter	Memperlancar adran ale	1 bulan	60.000.000	90	>			Kaur Perencanaan
		Rabat Seton Jalan Bingkungan	Lemshhang	09	meter	Momperlancar	2 Sulan	50,000,000	90	>			Kaur Perencapaan
		Rabat Batton (stan depan SD	Lemahbang	99	meter	Memperlancar Transportasi	3 bulan	35.000.000	Sansun	>		Commentor	Kaur Perencanaan
	O	Akur-aku Desa	Lemahbang	200	meter	Tata Ruang	3 bulan	160.000.000	900	٨			Kaur Perencanaan
		Stays wift	Desa	1	cnit	Wemperancar relekamunikasi	12 bulan	3.500.000	Qo	*		+	Kaur Perencanaan
	Penyelenggaraan milomasi Publik Dese	Insentif operator desa	Desir	n-t	ovene	Pengebolash (informasi desa	12 Bulan	3.000,000	89	>		-	Caux Dergnean
		5905	Quesa	1	drang	Pengebban Informesi desa	12 buan		go	>	-		Kaur Perencanaan
-17	- 8*					- Comments of the Comments of	ATMACAN PERMITSANG	1.907.000.000	ANY DESIGNATION OF THE PERSONS ASSESSMENT OF	Carrie Carre			CHARLES CONTRACTOR CONTRACTOR
A. Perimaan Kenanarakatan Desa	A Kebudayaan dan Kaagamaan	Norte	Desa			Perayaen hari Sesar	1 bolan	3,260,630	ONO				Kad Petayanan
		:376	Desa			Perayaan hari besar	1 Sulan	1,750,000	The				Kasi Kesmasy
1	edittis zesepromenous en sentitis en senti					None district	AUMILAN PERBUSANO	4,950,000	National Property Company				
A Pemberdayaan Masyarakat	Poningtaten Rapeskas Abaratur Desa	કેઇનાઇકલ લક્ષ્યાં કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કરા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કરા કરા કર્યા કરા કરા કર્યા કરા કર્યા કરા કરા કરા કર્યા કરા કરા કરા કર્યા કરા કરા કરા કરા કરા કરા કરા કરા કરા કર	D833	15	\$ue,o	Peningkatan kapastas	3 hari	10.000.000	00	>			Kati Perkerintahan
	Dukungsa Peospaman Modai	Polsthen Keder PKK	Desa	50	CKBAB	Peningkatan	3 hari	10.000.000	0:0	>			Kati Pewerintahan
	c ferternekan	Blos Ternak Kamblog	Оега	4	Kelompok	Peningkatan Ekonomi	\$ Cafule	100.000.000	APAD KEN	7			Kasi Kesmasy
	d Nodel	modei	Data	N	goë so	Peningkatan	3 Agri	5.000.000	90	٨	-		Kasi Pernecontahan
- 1							SIMIAH PEREIDANG	125.000.000		-	-	A COLOMBO TO STATE OF THE PARTY	
S Penarggulangan Bentana, keadaan Darutal dan	a Penanggulangan Berkona	Desig Aman Covid	Desa,			Penanggulangan bencana non alam	12 bulan		90	>		-	Kasikesmary
Wendestk	5 Keadaan Mendesak	Periberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa	52	Strang	Peringkatan Kasajahteraan	12 bulan		00	>		-	Kasi Kesmasy
	c Keadaan Mendesak	Kemiskinan Extreem di Dsea	ษรจติ	ō	orang	Peningkatan Kesejahteraan	3 bulan		50	>			Kati Keumasy
							FUNITH PERBICANG	o	- Constitution of the last				Software of Chicago and Control of
							SIMILAH TOYAL	2.882.969.239					
Pasyertsen model BUMDess	81							5.000.990	090				
							JUNIAH TOTAL	2.836,969,299			BANK	ANBUPATE.	

DERMOTER SALANDER OF THE SALAN